

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam dunia hubungan internasional, perubahan tatanan global serta pergeseran kekuasaan dapat dengan mudah terjadi, sebab sistem internasional tidak memiliki penegak supranasional, yang membedakannya dengan sistem politik domestik di mana pemerintah menegakkan hukum, sehingga mengakibatkan kemungkinan terciptanya tatanan dunia baru dengan sistem kekuatan dominan yang bergeser. Ketidakstabilan kondisi negara-negara di dunia memaksa para aktor untuk bergantung pada kemampuan dirinya sendiri sebagai upaya bertahan hidup, hal ini mengacu pada pertarungan abadi untuk kekuatan dan keamanan (Mearsheimer, 2001). Akibatnya, negara-negara di dunia akan cenderung mengutamakan “*self-help*” dan akumulasi kekuatan untuk menjamin kedaulatan dan kepentingan nasionalnya (Morgenthau, 1948). Gagasan ini menyinggung bahwa aktor negara harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk mempertahankan keamanan kedaulatan dan kelangsungan hidup dalam aspek pembangunan militer, pembentukan aliansi, dan penguatan ekonomi di bawah sistem internasional yang anarkis. Hal ini diperkuat oleh argumen paradigma realisme yang mengatakan bahwa sistem internasional secara alami memiliki sifat yang anarkis dimana tidak ada kekuasaan maupun otoritas tertinggi selain negara yang mengatur, mengadopsi maupun menerapkan sebuah aturan dan norma untuk menjaga stabilitas keamanan antar negara (Waltz, 1979). Para aktor negara yang kemudian berusaha menjaga kedaulatannya dan berupaya untuk menjalankan kepentingan nasionalnya akan meningkatkan kekuatan militer serta membangun aliansi kerjasama dengan negara lain. Peningkatan kapabilitas suatu negara akan secara otomatis memicu adanya ketegangan regional maupun global karena berpotensi mengancam kepada negara-negara sekitarnya, situasi seperti inilah yang disebut dengan dilema keamanan sebagai salah satu upaya negara untuk meningkatkan keamanannya, namun hal ini dapat menjadi bumerang bagi para aktor

negara karena memiliki celah yang menimbulkan konflik terbuka berskala besar dikarenakan adanya tensi geopolitik yang tinggi dan perang regional (Jervis, 1978).

Lanskap global telah mengalami perubahan kekuasaan besar dalam distribusi kekuatan sepanjang sejarah, hal ini ditandai dan dipengaruhi oleh serangkaian pergeseran kekuatan hegemon dari satu kekuatan ke kekuatan yang lain. Salah satu periode perubahan paling signifikan yang telah terjadi adalah pada saat abad ke-19 hingga awal abad ke-20, ketika kerajaan kolonial Eropa mulai mengalami kemunduran. Kekaisaran seperti Britania Raya, Prancis, Spanyol, dan Belanda, yang sebelumnya mendominasi dunia melalui ekspansi kolonial, mulai kehilangan kendali atas wilayahnya yang diakibatkan oleh perang kemerdekaan, gerakan dekolonisasi, serta melemahnya ekonomi pasca-Perang Dunia I dan II (Hobsbawm, 1994). Runtuhnya kerajaan kolonial Eropa mempercepat proses terjadinya perubahan tatanan dunia baru, yang ditandai dengan kebangkitan Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan setelah berakhirnya perang dunia II pada tahun 1945 dan perang dingin pada tahun 1991. Distribusi kekuasaan beralih menjadi kekuatan unipolar dengan negara Amerika Serikat sebagai satu-satunya kekuatan global terbesar dalam tatanan internasional. Amerika Serikat memanfaatkan keunggulan ekonominya untuk membentuk sistem internasional yang berpusat pada dirinya sendiri. Demi menciptakan tatanan dunia baru yang berbasis pada nilai-nilai demokrasi liberal dan ekonomi pasar bebas, Amerika Serikat mendirikan lembaga-lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *International Monetary Fund* (IMF), dan Bank Dunia untuk mendukung kekuasaan sentral pada negara Amerika Serikat (Ikenberry, 2011).

Seiring dengan perkembangan waktu dalam beberapa dekade terakhir, pergeseran kekuatan geopolitik terbesar pada abad ke-21 ditandai dengan hadirnya *Rising of China* yang dapat menantang dominasi Amerika Serikat dalam berbagai aspek terutama pada aspek ekonomi, militer dan teknologi. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang pesat dimulai sejak pengesahan kebijakan *Reform and Opening Up* Tiongkok pada tahun 1978 dipimpin oleh Deng Xiaoping yang mendorong kemungkinan perluasan pengaruh Tiongkok di dunia secara bertahap. Produk

Domestik Bruto (PDB) negara Tiongkok telah meningkat dari hanya US\$ 150 miliar pada tahun 1978 menjadi lebih dari US\$ 18 triliun pada tahun 2023, menjadikannya ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat (*World Bank*, 2023). Dengan pertumbuhan ini, Tiongkok telah meningkatkan investasi luar negeri melalui *Belt and Road Initiative* (BRI), yang memperluas jangkauan ekonomi dan geopolitiknya, terutama di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Sementara itu, dalam bidang militer, Tiongkok mereformasi modernisasi militer besar-besaran pada *People's Liberation Army* (PLA) dengan anggaran pertahanan yang mencapai US\$ 224,8 miliar pada tahun 2023, yang menjadikannya negara dengan pengeluaran anggaran pertahanan terbesar kedua setelah Amerika Serikat (*Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI), 2023). Namun kini, pada bidang militer armada angkatan laut, Tiongkok telah menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan angkatan laut terbesar di dunia dengan lebih dari 350 kapal perang, melampaui armada Amerika Serikat dalam jumlah kapal (*U.S. Department of Defense*, 2023). Selain itu pada bidang teknologi, Tiongkok semakin aktif untuk mendominasi persaingan ambisinya dengan Amerika Serikat terutama dalam proyek luar angkasa, *Artificial Intelligence* (AI), dan teknologi siber.

Kebangkitan Tiongkok terutama ambisinya dalam mendominasi kekuatan di ranah global mengakibatkan pergeseran baru pada tatanan internasional dari kekuatan unipolar pasca-Perang Dingin ke sistem multipolar, di mana Tiongkok menjadi kekuatan global yang menantang Amerika Serikat dalam berbagai aspek. Tiongkok mulai membentuk institusi alternatif seperti *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) untuk menyaingi pengaruh Bank Dunia dan IMF, serta memperkuat aliansi dengan negara-negara berkembang melalui BRICS yang beranggotakan negara Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan serta beberapa negara baru seperti Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Indonesia (Chow, Bazler Chair, & Moritz, 2016). Tiongkok juga secara aktif menentang dominasi Amerika Serikat di berbagai forum internasional, termasuk pada isu-isu global seperti regulasi perdagangan global, hubungan dengan Taiwan dan sengketa Laut China Selatan. Kemunculan kekuatan baru ini mengarah pada kemungkinan melemahnya kekuatan

hegemoni Amerika Serikat, yang semakin ditantang dalam mempertahankan pengaruhnya. Ketidakseimbangan ekonomi akibat defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Tiongkok, ketegangan di Laut China Selatan, serta persaingan teknologi dalam pengembangan AI dan semikonduktor semakin mempercepat transisi dari kekuatan unipolaritas ke multipolaritas. Jika situasi seperti ini terus berlanjut, dunia dapat bergerak menuju tatanan dunia baru, di mana Tiongkok menjadi salah satu aktor utama yang menyaingi Amerika Serikat dalam membentuk kebijakan global.

Kebangkitan Tiongkok dalam penelitian ini didefinisikan sebagai proses modernisasi militer secara komprehensif sejak era Xi Jinping, khususnya pada periode 2019 hingga 2023, yang ditandai dengan peningkatan anggaran pertahanan, akselerasi pengembangan teknologi dan persenjataan, serta ekspansi proyeksi kekuatan di kawasan Asia Timur. Kebangkitan ini tidak sekadar memperkuat pertahanan domestik Tiongkok, tetapi juga merepresentasikan upaya strategis untuk menantang status quo yang selama ini didominasi Amerika Serikat. Jika pada dekade sebelumnya kekuatan militer Tiongkok dinilai belum memiliki daya saing global, terfragmentasi oleh persoalan korupsi internal, keterbelakangan teknologi, dan orientasi yang terbatas pada pertahanan regional, maka sejak era Xi Jinping, khususnya pasca 2019, transformasi tersebut mengubah Tiongkok menjadi aktor militer yang semakin disegani di kancah internasional. Dengan demikian, kebangkitan Tiongkok dipahami dalam penelitian ini sebagai kebangkitan militer yang bersifat transformatif, yang menggeser kondisi dari keterbatasan dan kerentanan menjadi kekuatan dengan proyeksi global. Hal ini berimplikasi pada dinamika keamanan Asia Timur serta memperdalam dilema strategis Jepang dalam menjaga kedaulatan dan stabilitasnya, mengingat kedekatan geografis, rivalitas historis, serta keterikatan politik-militer Jepang dengan Amerika Serikat.

Realisme berargumen bahwa kompetisi, persaingan strategis, dan pengejaran kepentingan nasional merupakan kekuatan pendorong yang didukung oleh konflik berkelanjutan antara negara-negara yang sedang berkembang dan yang sedang mengalami kemunduran, hal ini merupakan akibat langsung dari sistem yang anarki (Mearsheimer, 2014). Akibat dari tidak adanya otoritas pusat yang dapat mengatur

perilaku negara secara efektif, kompetisi antara negara yang sedang naik dan negara yang mengalami kemunduran menjadi tidak terhindarkan. Negara-negara yang mengalami kebangkitan kekuatan, seperti Tiongkok, Brazil, India dan negara lainnya, akan berusaha memperluas pengaruhnya, baik melalui ekspansi ekonomi, militer, maupun diplomasi. Di sisi lain, negara-negara yang sebelumnya dominan tetapi mengalami stagnasi atau kemunduran, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan beberapa negara Eropa, cenderung mempertahankan hegemoninya dengan strategi *containment* (pengendalian), penyeimbangan, aliansi strategis, dan peningkatan kapabilitas pertahanan (Mearsheimer, 2014). Mearsheimer juga menyebutkan bahwa fenomena muncul akibat adanya persaingan kekuatan besar yang berusaha mengamankan kepentingannya masing-masing sebab ketidakstabilan yang sedang terjadi secara global, hal ini disebut sebagai "*Tragedy of Great Power Politics*". Kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan dominan di kawasan Asia-Pasifik telah memicu kondisi dimana tindakan suatu negara untuk memperkuat keamanannya dianggap sebagai ancaman oleh negara lain yang biasa disebut dengan dilema kewanitaan. Hal ini mendorong negara-negara lain untuk merespon hal yang sama dengan meningkatkan kapasitas pertahanannya sehingga menyebabkan perlombaan senjata, peningkatan ketegangan geopolitik, serta terbentuknya aliansi strategis yang berpotensi memperburuk konflik regional dan global (Jervis, 1978).

Kompetisi kekuasaan dalam sistem yang anarkis memicu rivalitas antar negara yang memiliki kekuatan dominan dalam sistem multipolar, hal ini tidak hanya melibatkan hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai negara dengan kekuatan terbesar di abad ke-21 namun juga melibatkan negara-negara kawasan terkhususnya kawasan Asia Pasifik yang terkena dampak nyata akan adanya ancaman strategis dari kebangkitan Tiongkok terutama akibat ekspansi militernya yang agresif. Modernisasi militer yang pesat serta pendekatan diplomasi koersif yang diterapkan oleh Tiongkok menunjukkan bahwa kebangkitan ini bukan hanya sekadar peningkatan kapabilitas nasional, tetapi juga strategi untuk menegaskan dominasi regional dan global (Mearsheimer, 2014). Salah satu tujuan utama ekspansi militer Tiongkok adalah

untuk menegaskan klaimnya atas wilayah sengketa di kawasan Asia-Pasifik seperti tindakan agresif yang selalu meningkat dari Tiongkok di wilayah Laut China Selatan menunjukkan pola ekspansionisme yang tidak hanya melanggar keputusan arbitrase internasional, tetapi juga mencerminkan pendekatan untuk merubah dominasi dalam tatanan global. Tiongkok berusaha mengubah status quo di kawasan dengan mengklaim hampir 90% Laut China Selatan berdasarkan konsep *Nine Dash Line*, yang bertentangan dengan klaim dari negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia. Klaim ini telah berulang kali diperdebatkan dalam forum internasional. Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag memutuskan bahwa klaim Tiongkok tidak memiliki dasar hukum pada tahun 2016, namun hal ini tidak menghentikan aktivitas militer Tiongkok di wilayah sengketa. Tiongkok menolak legitimasi hukum internasional dan melanjutkan pembangunan pulau buatan dan pangkalan militer di Kepulauan Spratly dan Paracel kawasan Laut China Selatan (*Permanent Court of Arbitration*, 2016). Selain itu, pembangunan pangkalan militer Tiongkok di tujuh pulau buatan pada wilayah Laut China Selatan, termasuk di *Mischief Reef* dan *Fiery Cross Reef*, kini telah dilengkapi dengan landasan pacu sepanjang 3.000 meter, radar canggih, serta sistem rudal permukaan-ke-udara HQ-9 yang mampu mengancam pesawat militer Jepang dan Amerika Serikat yang beroperasi di wilayah tersebut (CSIS, 2023). Kehadiran pangkalan militer ini meningkatkan kontrol China atas jalur perdagangan utama, yang sangat penting bagi Jepang, mengingat lebih dari 40% impor energinya melewati Laut China Selatan. Hal seperti ini dikhawatirkan dapat menjadi preseden bagi tindakan serupa di wilayah lain seperti Laut China Timur dan Selat Taiwan (Beckman, 2019).

Agresi militer Tiongkok dalam upayanya untuk menegaskan dominasi strategis di tingkat regional dan global semakin meluas, tidak hanya terbatas pada sengketa wilayah di Laut China Selatan, tetapi juga merambah pada jalur perdagangan tersibuk dunia, di mana lebih dari 50% volume perdagangan global melewati perairan ini setiap tahunnya (CSIS, 2023). Selat Taiwan yang memisahkan Taiwan dari Tiongkok dengan jarak membentang sejauh 180 kilometer menjadi salah satu titik ketegangan geopolitik

tertinggi di kawasan Indo-Pasifik. Tiongkok mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan menegaskan bahwa penyatuan kembali dengan daratan utama adalah "misi historis" yang harus diselesaikan oleh Tiongkok, baik melalui langkah damai maupun dengan kekuatan militer jika diperlukan. Dalam proses menekan Taiwan dan menghalangi intervensi asing, aktivitas militer yang dilakukan oleh PLA secara rutin menyelenggarakan latihan militer skala besar di Selat Taiwan, termasuk simulasi invasi, blokade ekonomi, dan pelanggaran wilayah udara melalui *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) Taiwan (U.S. *Department of Defense*, 2023). Taiwan menanggapi hal ini dengan melakukan modernisasi militer besar-besaran untuk menyeimbangi kekuatan Tiongkok di kawasan dengan peningkatan anggaran pertahanan sebesar US\$ 19,2 miliar pada 2023, yang difokuskan pada peningkatan sistem pertahanan udara, rudal anti-kapal, serta perang asimetris untuk menghadapi keunggulan PLA (Taiwan Ministry of National Defense, 2023). Taiwan juga memperkuat aliansi kerjasama pertahanannya dengan Amerika Serikat, termasuk pembelian sistem pertahanan udara patriot, jet tempur F-16V, dan kapal perang canggih untuk meningkatkan kemampuan tempur lautnya (U.S. *Department of Defense*, 2023). Ketegangan di kawasan Indo Pasifik mencapai titik kritis pada Agustus 2022, setelah kunjungan Nancy Pelosi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, ke Taiwan. Hal ini memicu tanggapan serius yang dilakukan oleh Tiongkok, dengan melakukan latihan militer terbesar yang pernah dilakukan di sekitar Selat Taiwan, yang tidak hanya bertujuan untuk menunjukkan kekuatan militernya terhadap Taiwan, tetapi juga sebagai sinyal peringatan bagi sekutu-sekutu Amerika Serikat di kawasan, termasuk Jepang (*Global Times*, 2022). Salah satu eskalasi paling signifikan dalam latihan militer ini adalah penembakan lima rudal balistik yang mendarat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Jepang, sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya (NHK, 2022). Insiden ini menandai pertama kalinya Tiongkok secara langsung mengancam wilayah maritim Jepang dengan serangan rudal, meningkatkan kekhawatiran Jepang akan kemungkinan serangan militer yang lebih agresif di masa depan (*Ministry of Defense Japan*, 2022).

Dinamika konflik di Indo Pasifik semakin kompleks, dengan Tiongkok yang tidak hanya memperkuat tekanannya terhadap Taiwan tetapi juga meningkatkan aktivitas militernya di Laut China Timur, terutama dalam sengketa dengan Jepang terkait Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Pergeseran kekuatan di Asia Timur dipengaruhi oleh redistribusi pengaruh politik, ekonomi, dan militer antara Tiongkok dan Jepang. Pasca akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Jepang secara historis merupakan negara terkuat di Asia Timur, mempertahankan status hegemoninya hingga kalah dalam Perang Dunia II (Pyle, 2007). Asia Timur telah lama menjadi wilayah dengan persaingan geopolitik yang ketat, dimana pergeseran kekuasaan memiliki konsekuensi yang signifikan tidak hanya bagi negara-negara yang terlibat secara langsung, tetapi juga bagi dinamika keamanan regional dan global. Keseimbangan kekuatan regional telah diubah secara drastis oleh pergeseran kekuatan ini. Dalam misinya untuk menegaskan dominasi regional, Tiongkok telah menantang supremasi regional Jepang yang telah berlangsung lama dalam beberapa dekade terakhir dengan memanfaatkan pertumbuhan ekonomi, ekspansi militer, dan pengaruh diplomatiknya. Perkembangan ekonomi dan modernisasi militer Tiongkok yang berkembang pesat di era pasca-Perang Dingin telah membuat posisi Jepang semakin tertekan. Dibawah strategi “*Chinese Dream*” dalam pemerintahan Xi Jinping, Tiongkok telah melakukan berbagai cara dalam memperkuat dominasi regionalnya seperti dengan meningkatkan aktivitas militernya dengan berpatroli di kawasan Laut Cina Timur dan melakukan pemantauan rutin di wilayah *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) milik Jepang (CSIS, 2023). Kekuatan militer angkatan laut Tiongkok juga mengalami peningkatan yang signifikan semenjak adanya ekspansi *People’s Liberation Army* (PLA). Tak hanya itu, Tiongkok juga melakukan peningkatan alutsista pada tahun 2022 melalui peluncuran kapal induk ketiga dengan sistem pelontar yang sangat canggih bernama kapal induk Fujian, hal ini membuat Tiongkok memiliki tiga kapal induk besar termasuk kapal induk Liaoning, Shandong, dan Fujian (Mastro, 2021). Hal ini membuat pengaruh regional Tiongkok semakin menguat dengan mengubah keseimbangan kekuatan yang menjadikan Tiongkok sebagai negara dengan dominasi terbesar di kawasan Asia Timur (Shambaugh, 2020).

Kondisi geografis Jepang yang berdekatan dengan wilayah ekspansi militer Tiongkok menjadikannya salah satu negara yang paling rentan terhadap ancaman keamanan di Asia Timur. Jepang tidak hanya berhadapan langsung dengan Tiongkok dalam sengketa teritorial di Laut China Timur, tetapi juga terancam oleh proyeksi kekuatan militer Tiongkok yang semakin agresif di kawasan Indo-Pasifik. Secara geografis, Kepulauan Senkaku/Diaoyu menjadi titik paling strategis yang sangat rentan terhadap eskalasi konflik mengingat jarak diantaranya dengan daratan Tiongkok hanya sekitar 330 kilometer. Secara historis, kebijakan keamanan Jepang telah dibatasi oleh *Japan's Pacifist Constitution (Article 9 of the 1947 Constitution)* namun, pergeseran kekuatan dan perubahan dinamika keamanan yang semakin kompleks akibat dari kebangkitan Tiongkok di kawasan Asia Timur membuat Jepang semakin terancam akan peningkatan kekuatan militer Tiongkok yang semakin agresif. Kekuatan yang menjadi faktor utama dalam memainkan posisi politik global membuat negara akan terus berusaha memperkuat posisi mereka sehingga mengakibatkan tatanan global memiliki sifat yang dinamis (Gilpin, 1981). Maka dari itu, Jepang pada akhirnya melakukan berbagai rekonstruksi terhadap kebijakan keamanannya sebagai tanggapan atas meningkatnya ketegangan dengan Tiongkok di kawasan Asia Timur menurut data yang telah dikeluarkan oleh *Japan's National Security Strategy (NSS)* pada tahun 2022. Dalam aspek ekonomi dan militer, Jepang telah meningkatkan anggaran pertahanannya hingga mencapai rekor ¥43 triliun (315 miliar dolar AS) per tahun 2023 hingga 2027 yakni mengalami peningkatan sebesar 2% dan menjadi yang terbesar sejak perang dunia II, hal ini menjadikan Jepang sebagai negara dengan anggaran militer terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Tiongkok (Kementerian Pertahanan Jepang, 2023). Selain itu, untuk mencegah agresi dari Tiongkok, Jepang menguasai kemampuan serangan jarak jauh seperti meningkatkan rudal jelajah Tomahawk dan senjata hipersonik. Jepang juga melakukan perluasan *Japan Self Defense Force (JSDF)* di kepulauan barat daya, yang memiliki jarak dekat dengan Taiwan. Tak hanya itu, Jepang juga meningkatkan upaya keamanan siber dan pertahanan ruang angkasa sebagai respon terhadap kemajuan Tiongkok dalam bidang *artificial intelligence*, perang siber, dan teknologi rudal,

Ketegangan dengan Jepang mengalami peningkatan terutama pada kawasan Laut Cina Timur terkait masalah teritorial seperti Kepulauan Senkaku/Diaoyu, postur militer, dan persaingan ekonomi. Klaim teritorial Tiongkok yang agresif, ekspansi militer yang bergerak dengan cepat, dan pengaruh regional yang terus meningkat telah secara radikal mengubah keseimbangan strategis di Asia Timur dan menciptakan tantangan langsung terhadap posisi keamanan Jepang. Militer Tiongkok telah berevolusi selama 20 tahun terakhir, berawal dari kekuatan pertahanan yang berorientasi regional menjadi militer modern yang mampu memproyeksikan kekuatan dengan aspirasi untuk seluruh dunia. Investasi berskala besar dalam teknologi militer, modernisasi pasukan, dan pemosisian strategis telah menjadi kekuatan pendorong di balik pergeseran ini, faktor-faktor ini yang secara langsung menantang posisi keamanan Jepang (Fravel, 2019). Ekspansi militer Tiongkok juga tercermin dalam tindakannya yang semakin tegas di wilayah yang disengketakan, terutama di Laut Cina Timur (Sakaki, 2019). Skala dan kecepatan peningkatan militer Tiongkok telah menempatkan Jepang pada posisi reaktif dan memaksanya untuk secara drastis mengubah kebijakan keamanannya, meningkatkan anggaran pertahanan, dan memperkuat aliansi militer untuk menavigasi pergeseran dinamika kekuatan regional. Jepang perlu mengerahkan jet tempur pada tingkat yang sangat tinggi untuk mencegah pesawat terbang Tiongkok yang mendekati wilayah udaranya, namun dapat membebani sumber daya angkatan udara milik Jepang dan meningkatkan risiko konfrontasi militer yang tidak diinginkan (Hornung, 2020).

Tiongkok menerapkan strategi *Gray Zone Tactics* (GZT) untuk mencapai tujuan geopolitik tertentu tanpa menyebabkan konflik berskala besar di kepulauan Senkaku/Diaoyu, strategi ini merujuk pada tindakan koersif yang dilakukan di bawah ambang batas perang terbuka, mengaburkan garis antara damai dan konflik dengan mengandalkan kekuatan non-militer konvensional seperti milisi maritim dengan menggunakan kapal nelayan yang beroperasi di bawah pengawasan milisi maritim untuk memperkuat klaimnya di wilayah sengketa. Pengesahan undang-undang *Chinese Coast Guard* dan serangan operasi siber terhadap infrastruktur strategis serta kampanye

disinformasi digunakan untuk mengacaukan kebijakan negara target, hal ini yang menyebabkan peningkatan ketegangan di kawasan yang semakin besar (Hornung, 2020). Pada tahun 2022 berdasarkan laporan data dari *RAND Corporation*, lebih dari 3.000 kapal nelayan tergabung dalam milisi maritim yang diorganisir oleh *People's Liberation Army Navy* Tiongkok guna untuk melakukan "*civil invasion*" melalui kapal nelayan sipil ke perairan yang berselisih. Pada bulan Oktober tahun 2023, Jepang mengerahkan keamanan militernya dengan meningkatkan patroli oleh *Japan Maritime Self-Defense Force* (JMSDF) untuk mencegah insiden peningkatan kapal nelayan Tiongkok yang memasuki perairan kepulauan Senkaku.

Hal ini merupakan ancaman nyata secara langsung bagi Jepang terutama setelah pengesahan *Chinese Coast Guard Law* (CCG) pada tahun 2021 yang merupakan salah satu hasil dari strategi ini. Kapal-kapal CCG beroperasi secara agresif di perairan yang disengketakan untuk menekan pihak lawan tanpa menggunakan angkatan laut secara langsung, selain itu Tiongkok mengizinkan penggunaan kekuatan penuh untuk menghadapi kapal-kapal asing di perairan maupun wilayah yang sudah diklaim oleh Tiongkok terkhususnya wilayah persengketaan di kawasan Laut China Selatan dan Laut China Timur (Kim, 2021). Tiongkok seringkali melakukan berbagai macam pelanggaran melalui batas-batas laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) milik Jepang, namun kapal Tiongkok baru saja memecahkan rekor terbaru dalam sejarah konflik maritim Jepang dan Tiongkok pada tahun 2023, ketika mereka memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Jepang selama 336 hari di sekitar Kepulauan Senkaku/Diaoyu (Japan Coast Guard, 2023). Tak hanya itu, Tiongkok juga melakukan peningkatan keberadaan *Chinese Coast Guard* (CCG) dan *People's Liberation Army Navy* (PLAN) sebagai upaya penekanan terhadap Jepang dengan mengadakan latihan angkatan laut di dekat wilayah Jepang (SIPRI, 2023).

Sejak awal tahun 2000, Tiongkok telah secara konsisten meningkatkan anggaran belanja pertahanannya dengan fokus pada penguatan Angkatan Laut, Angkatan Udara, serta pengembangan teknologi militer mutakhir seperti rudal hipersonik, kecerdasan buatan (AI) dalam perang modern, dan sistem persenjataan

berbasis ruang angkasa (*Office of the Secretary of Defense*, 2022). Anggaran pertahanan Tiongkok mengalami kenaikan dua digit setiap tahunnya sejak tahun 2000, menjadikannya sebagai negara dengan anggaran militer terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat (*Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)*, 2023). Dalam konteks maritim, Angkatan Laut Tiongkok (PLAN) telah berkembang menjadi kekuatan laut terbesar di dunia dalam hal jumlah kapal perang, mengungguli Amerika Serikat (*U.S. Department of Defense*, 2023). Pada tahun 2023, PLAN memiliki lebih dari 350 kapal perang, dibandingkan dengan U.S. Navy yang memiliki sekitar 290 kapal perang (*Congressional Research Service*, 2023). Kehadiran kapal perang dan kapal penjaga pantai Tiongkok di Laut China Timur dan Laut China Selatan semakin memperkuat klaim teritorialnya terhadap wilayah-wilayah yang disengketakan, termasuk dengan Jepang (*Ministry of Defense Japan*, 2022). Selain itu, Tiongkok juga terus memperkuat pangkalan militernya di Laut China Timur, termasuk di dekat Kepulauan Senkaku, yang diklaim oleh Jepang tetapi juga menjadi objek sengketa dengan Tiongkok (*IISS*, 2023). Pangkalan militer di provinsi Zhejiang dan Fujian menjadi titik strategis utama bagi Tiongkok untuk memperluas kontrolnya di kawasan Asia Timur (*China Aerospace Studies Institute*, 2023). Dalam konteks udara, Angkatan Udara Tiongkok (PLAAF) telah mengembangkan jet tempur generasi kelima seperti J-20 dan H-20 *stealth bomber*, yang dirancang untuk menyaingi pesawat tempur canggih Amerika Serikat dan Jepang seperti F-22 *Raptor* dan F-35 *Lightning II* (Kania, 2023). Selain itu, peningkatan jumlah peluncuran rudal balistik dan manuver udara di sekitar Taiwan dan Jepang semakin mengkhawatirkan, karena menunjukkan kesiapan militer Tiongkok dalam menghadapi potensi konflik di kawasan (BBC News, 2023).

Sejak tahun 2019 hingga 2023, aktivitas militer Tiongkok di sekitar Kepulauan Senkaku/Diaoyu mengalami peningkatan secara signifikan dan semakin intensif, termasuk patroli angkatan laut yang semakin sering, penerobosan *Air Defence Identification Zone* Jepang (ADIZ), serta latihan militer berskala besar di sekitar Taiwan dan Laut China Timur (*Ministry of Defense Japan*, 2022). Tiongkok juga meningkatkan pengembangan teknologi rudal hipersonik, seperti DF-17, yang

memiliki kemampuan penetrasi tinggi terhadap sistem pertahanan udara Jepang dan sekutunya (Smith, 2023). Pada tahun 2019, Tiongkok meningkatkan aktivitas militernya di Laut China Timur, terutama di kawasan yang disengketakan yakni Kepulauan Senkaku/Diaoyu yang menjadi subjek konflik antara Tiongkok dan Jepang. *Japan Air Self-Defense Force* (JASDF) telah melakukan 657 pencegatan terhadap pesawat militer Tiongkok yang mendekati wilayah udaranya pada 1 April 2019 hingga 31 Maret 2020, menurut Kementerian Pertahanan Jepang (*Japan Defense Focus*, 2020). Pemerintah Jepang menerbitkan *Annual White Paper* yang berjudul "*Defense of Japan*" pada bulan Juli tahun 2023 sebagai sebuah tanggapan peningkatan upaya strategi keamanan Jepang di kawasan Indo Pasifik. Dokumen tersebut menekankan bahwa Jepang harus menanggapi Tiongkok sebagai "tantangan strategis terbesar yang belum pernah ada dalam sejarah". Jepang menyatakan "*China's external posture, military activities, and other activities are a matter of serious concern for Japan and the international community and present an unprecedented and the greatest strategic challenge which Japan should respond with its comprehensive national power and in cooperation and collaboration with its ally, like-minded countries and others.*" Pernyataan ini menunjukkan peningkatan kekhawatiran Jepang terhadap aktivitas militer dan ekonomi Tiongkok di kawasan tersebut (*Defence of Japan*, 2023). Tiongkok terus melakukan berbagai pelanggaran melalui pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) pada perairan Jepang dengan meningkatkan keberadaan *Chinese Coast Guard* (CCG) dan *People's Liberation Army Navy* (PLAN) yang mengadakan latihan angkatan laut di dekat wilayah Jepang (SIPRI, 2023). Aktivitas militer Tiongkok terus meningkat hingga pada tahun 2023 di bulan Juli, negara Tiongkok dan Rusia yang sedang melakukan latihan gabungan di samudra Pasifik dengan total 11 kapal perang Tiongkok dan Rusia yang terdiri dari enam kapal perusak rudal milik Tiongkok, dan lima kapal perusak milik Rusia melakukan pelayaran di dekat kepulauan selatan Jepang tepatnya melewati prefektur Okinawa dan pulau Miyako, yang memicu respon dari kementerian pertahanan Jepang yang mengatakan "*clearly aimed at demonstrating their force against our country, and it's concerning from the viewpoint of national security.*" (Kyodo News, 2023).

Dalam menanggapi ancaman ini, Jepang telah mengalami perubahan dalam mengambil langkah signifikan terhadap kebijakan pertahanannya. Jepang melakukan rekonstruksi ulang pada beberapa kebijakan luar negeri serta pertahanannya untuk menghadapi ancaman Tiongkok yang semakin agresif, dalam hal ini Jepang menerapkan adopsi reinterpretasi Pasal 9 Konstitusi pada tahun 2014 yang memungkinkannya untuk melaksanakan strategi *Collective Self-Defense* (CSD) (Putri, 2018). *Collective self-defense* merupakan strategi negara untuk melindungi dan membela sekutunya yang sedang dalam posisi terancam maupun diserang sehingga mengacu pada hak negara untuk menggunakan kekuatan militer, meskipun negara tersebut tidak secara langsung diserang. Pada konteks negara Jepang, hal ini menyoroti keterlibatan aktif dalam aliansi keamanan, terutama dengan Amerika Serikat, untuk menghadapi ancaman di kawasan Indo-Pasifik (Putri, 2018). Implementasi CSD dipertegas melalui *National Security Strategy* (NSS) tahun 2022, yang memungkinkan Jepang untuk membela sekutu dan memperkuat kerjasama keamanan dengan negara-negara mitra seperti Amerika Serikat, Australia, dan Filipina. Ketentuan NSS Jepang menekankan kepentingan Jepang untuk mengadopsi kebijakan baru yang disebut *counterstrike capability* atau kemampuan serangan balik demi mempertahankan kedaulatan serta kepentingan nasionalnya, hal ini terjadi untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II. Langkah ini memperlihatkan perubahan signifikan dalam doktrin pertahanan Jepang yang selama ini berorientasi pada pertahanan diri yang bersifat defensive dan pasif. Dalam strategi kebijakan keamanan nasionalnya, Jepang secara eksplisit menyatakan bahwa suatu negara termasuk Jepang perlu memiliki kemampuan untuk menghadapi ancaman dari eksternal yakni kemampuan negara lain yang memiliki kapasitas militer ofensif yang tinggi, terutama pada kondisi meningkatnya ketegangan di kawasan Asia Timur (*Ministry of Defense Japan*, 2022). Pada akhirnya, kebangkitan Tiongkok yang mempengaruhi stabilitas kawasan di Asia Timur memaksa Jepang untuk menanggapi ancaman tersebut dengan perilaku ancaman balik terhadap Tiongkok.

Pada aspek militeristik, Jepang secara aktif meningkatkan alutsistanya sebagai respons terhadap kebangkitan Tiongkok di berbagai kawasan termasuk kawasan Asia Timur yang dihadapi oleh ancaman nyata, mengingat Tiongkok pernah meluncurkan rudal balistiknya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif milik Jepang untuk memperingati sekutu agar tidak memperluas dominasinya kepada Taiwan (Kyodo News, 2022). Peningkatan alutsista Jepang dilakukan pada sektor pertahanan udara, maritim, dan rudal secara signifikan terutama dalam kurun waktu 7 tahun terakhir pada tahun 2019 hingga 2023. Jepang mengalokasikan anggaran belanja pertahanannya untuk memperkuat daya tangkal terhadap ancaman regional dengan memperoleh rudal jarak jauh, termasuk rudal jelajah Tomahawk dari Amerika Serikat dan pengembangan rudal hipersonik domestik. Pada sektor pertahanan udara Jepang mengembangkan senjata Type 12 *Surface-to-Ship Missile* (SSM) yang dapat mencapai target hingga 1.000 km, sebagai pertahanan tinggi jika terjadi konflik terbuka yang memungkinkan Jepang untuk bisa menyerang pangkalan militer musuh (*Ministry of Defense Japan*, 2023). Pesawat tempur F-35B disiapkan untuk tingkatan operasi peluncuran yang lebih efektif oleh Jepang dengan meningkatkan kapabilitas dan jumlah kapal perangnya termasuk perombakan kapal perusak kelas Izumo (*Ministry of Defense Japan*, 2023). Pada sektor pertahanan maritim, Jepang meningkatkan kemampuan anti-kapal selamnya dalam menghadapi ancaman Tiongkok di kawasan sengketa Laut China Timur dengan peningkatan jumlah kapal selam kelas Taigei (*Ministry of Defense Japan*, 2023). Dalam sistem pertahanan udara, Jepang mempercepat pengembangan yang lebih canggih, termasuk kerja sama dengan Inggris dan Italia untuk mengembangkan *Next-Generation Fighter Jet* dalam program *Global Combat Air Programme* (GCAP), yang akan menjadi pesawat tempur generasi keenam untuk menggantikan armada F-2 Jepang (*Ministry of Defense Japan*, 2023). Program ini bertujuan untuk membangun pesawat tempur canggih yang dapat bersaing dengan J-20 China dan Su-57 Rusia, sekaligus memperkuat kapabilitas tempur udara Jepang di kawasan Indo-Pasifik (*Japan Times*, 2023). Jepang juga meningkatkan kerjasama dengan Amerika Serikat dalam pengembangan *Aegis System Equipped Vessels* (ASEV) yang merupakan sistem pertahanan anti-rudal yang dirancang untuk menangkal potensi

serangan dari Tiongkok dan Korea Utara. Selain peningkatan alutsista secara signifikan, Jepang juga memperkuat basis militernya dengan rutin melakukan latihan gabungan dengan bergabung pada aliansi *Quadrilateral Security Dialogue* (Quad). Peningkatan frekuensi latihan militer bersama dengan Amerika Serikat, Australia, dan India adalah bagian dari upaya Jepang untuk memperkuat kesiapan operasional dan interoperabilitas militer dalam menghadapi potensi ancaman dari Tiongkok. Jepang memperkuat pertahanannya di Kepulauan Nansei (Ryukyu), termasuk Okinawa, dengan menempatkan lebih banyak unit rudal serta meningkatkan infrastruktur militer di pulau-pulau terdekat dengan Taiwan (Kyodo News, 2023).

Kebijakan keamanan Jepang sangat dipengaruhi oleh aliansinya dengan Amerika Serikat. Aliansi keamanan Amerika Serikat dan Jepang telah menjadi landasan strategi keamanan pasca perang Jepang, dan aliansi ini tetap menjadi faktor kunci dalam tanggapan Jepang terhadap kemampuan militer Tiongkok yang terus meningkat. Ketegangan antara Tiongkok dan Jepang masih berpusat pada kehadiran militer Amerika Serikat di Jepang, khususnya di Okinawa. Tiongkok melihat kemitraan antara Amerika Serikat dan Jepang sebagai ancaman potensial terhadap ambisi regionalnya yang mungkin terjadi terhadap aspirasi regionalnya. Di sisi lain, mengingat penumpukan militer Tiongkok, Jepang memandang kemitraan ini sebagai hal yang krusial bagi keamanannya (Huang, 2020). Menurut Jepang, Amerika Serikat berfungsi sebagai penjamin keamanan dan penyeimbang kekuatan militer Tiongkok di kawasan ini. Kerjasama pertahanan Amerika Serikat dan Jepang yang semakin meningkat, khususnya dalam pertahanan rudal dan latihan militer bersama, telah dilihat oleh Tiongkok sebagai upaya untuk menahan kebangkitan Tiongkok (Huang, 2020). China mengkritik kebijakan pertahanan baru Jepang sebagai langkah "provokatif" dan meningkatkan patroli militernya di sekitar Jepang. Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa Jepang "meninggalkan tradisi damai pasca-perang" dan berusaha membangun kembali kekuatan militernya (*Global Times*, 2023).

Strategi *gray zone tactics* telah diterapkan oleh Tiongkok di wilayah perairan, seperti penggunaan milisi maritim dan tekanan non-militer di kawasan sengketa,

menunjukkan pola strategi yang lebih luas dalam mengubah status quo tanpa konfrontasi langsung. Pendekatan ini cukup membuat Jepang fokus dalam menghadapi tekanan fisik di laut dalam melakukan perlawanan militer angkatan laut, sementara itu Tiongkok fokus mengalihkan perhatiannya ke domain lain sebagai strategi pemanfaatan teknologi serangan siber dan perang informasi. Tiongkok mempengaruhi opini publik di dalam dan di luar negeri dengan menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi mengenai Kepulauan Senkaku yang secara historis adalah milik Tiongkok, sehingga hasil dari pengunggahan konten tersebut membuat pemerintah Jepang perlu memperkuat penyebaran informasi dan mempertahankan kebijakan maritimnya kearah yang lebih tegas (*Asia Times*, 2023). Dalam upayanya mengklaim Kepulauan Senkaku, China tidak hanya mengandalkan sejarah sebagai alat pembenaran, strategi informasi digunakan untuk menciptakan legitimasi atas klaim mereka, terutama dengan menyebarkan narasi historis bahwa kepulauan tersebut telah lama menjadi bagian dari wilayah Tiongkok. Dengan cara ini, Tiongkok tidak hanya berusaha memenangkan perdebatan sejarah, tetapi juga membangun lingkungan digital yang mendukung kepentingannya, melemahkan tanggapan negara-negara kawasan yang menentang pernyataan tersebut. Namun pada *gray zone tactics*, Tiongkok mengadopsi pendekatan yang lebih agresif selain melalui kampanye disinformasi yakni melalui serangan siber, strategi ini dapat menjadi penguat propaganda Tiongkok yang menargetkan pemerintah dan media Jepang dengan tujuan untuk merusak kredibilitas informasi yang menentang klaim Tiongkok. Menurut laporan dari *National Institute of Information and Communications Technology* (NICT) sejak tahun 2022, Tiongkok telah melakukan lebih banyak peretasan yang menargetkan infrastruktur energi dan transportasi di Jepang. Selain itu, serangan siber juga terjadi pada tahun 2023, dimana *Japan Aerospace Exploration Agency* (JAXA) mengalami serangan yang bertujuan untuk mencuri data sensitif terkait pertahanan dan teknologi luar angkasa, diduga serangan berasal dari kelompok yang terkait dengan negara Tiongkok (Kyodo News, 2023). Dengan cara ini, Tiongkok tidak hanya berusaha memenangkan perdebatan sejarah, tetapi juga membangun lingkungan digital yang mendukung kepentingannya, melemahkan tanggapan negara-negara kawasan yang menentang pernyataan tersebut.

Jepang merespons ancaman di ranah siber dan ekonomi digital, yang menjadi medan pertempuran baru dalam persaingan geopolitik. Pemerintah Jepang menerapkan *Economic Security Promotion Act* (2022) untuk melindungi sektor industri strategis dari pencurian teknologi dan upaya infiltrasi asing, terutama dari Tiongkok (Nikkei Asia, 2023). Undang-undang ini mencakup langkah-langkah ketat dalam kontrol ekspor teknologi sensitif, penguatan rantai pasokan, serta perlindungan infrastruktur kritis seperti jaringan komunikasi 5G, sistem keuangan, dan energi. Jepang juga memperkuat kerjasama dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam pengembangan sistem pertahanan siber, termasuk peningkatan deteksi dini terhadap potensi serangan siber dari aktor negara seperti Tiongkok dan Korea Utara. Melalui inisiatif ini, Jepang berinvestasi dalam *AI-driven cybersecurity*, *satellite-based surveillance*, serta sistem enkripsi canggih untuk memperkuat pertahanan digitalnya (*European Cybersecurity Organization*, 2023).

Jepang juga telah mengambil langkah strategis dalam memperkuat kapabilitas maritimnya untuk menjaga kedaulatan nasional dan mengantisipasi peningkatan ketegangan di Laut China Timur. Peningkatan jumlah armada serta kapabilitas *Japan Coast Guard* (JCG) merupakan salah satu upaya Jepang untuk menghadapi ancaman dari pemantauan kapal CCG di sekitar wilayah sengketa. *Japan Maritime Self-Defense Force* (JMSDF) juga diperkuat dengan peningkatan jumlah kapal perusak Aegis, kapal selam canggih, serta sistem drone maritim untuk meningkatkan daya tangkal terhadap potensi agresi dari Tiongkok. Pada tahun 2023, pemerintah Jepang mengalokasikan anggaran tambahan sebesar ¥700 miliar untuk memperkuat pengawasan dan kapabilitas maritim di wilayah yang berpotensi mengalami eskalasi konflik (*Ministry of Defense Japan*, 2023). Dengan anggaran ini, Jepang menargetkan peningkatan jumlah kapal patroli dari 70 unit menjadi 80 unit pada 2025 serta penambahan kapasitas radar dan satelit pengawasan maritim untuk mendeteksi pergerakan kapal-kapal asing yang memasuki perairannya tanpa izin. Selain itu, pemerintah juga mempercepat pengembangan rudal anti-kapal jarak jauh untuk meningkatkan daya tangkal terhadap potensi serangan maritim dari Tiongkok (*Japan Times*, 2023). Terlepas dari segi

peningkatan kapabilitas maritim, Jepang pun rutin melakukan latihan militer gabungan *Keen Sword* tahun 2023 dengan Amerika Serikat dan memperkuat intensitasnya dengan melibatkan lebih dari 120.000 personel, ratusan kendaraan tempur, kapal perang, serta pesawat tempur sebagai upaya mempererat kerjasama pertahanan dengan sekutu strategisnya (U.S. *Indo-Pacific Command*, 2023). Latihan ini dirancang untuk menguji kesiapan dalam menghadapi ancaman maritim dan konflik *gray zone* dengan Tiongkok. Di tingkat multilateral, Jepang juga menandatangani *Reciprocal Access Agreement* (RAA) dengan Filipina dan Australia guna memperkuat koordinasi keamanan maritim di kawasan Indo- Pasifik. Kesepakatan ini memungkinkan pasukan dari ketiga negara untuk berlatih bersama dan mempercepat respons terhadap ancaman di laut (*Australian Department of Defence*, 2023). Dengan langkah-langkah ini, Jepang berupaya menyeimbangkan ancaman yang semakin kompleks melalui kombinasi penguatan militer, diplomasi keamanan, dan strategi pertahanan digital. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan stabilitas regional, tetapi juga untuk menegaskan peran Jepang sebagai aktor utama dalam arsitektur keamanan Indo Pasifik.

Kekhawatiran keamanan Jepang terhadap Tiongkok berakar kuat pada faktor historis dan perkembangan kontemporer. Kemampuan militer Tiongkok yang meningkat pesat, terutama pada kekuatan angkatan laut, menjadi katalisator utama peningkatan kecemasan Jepang terhadap Tiongkok. Meningkatnya ketegasan Tiongkok di Laut China Timur, termasuk sengketa atas Kepulauan Senkaku/Diaoyu, telah dipandang sebagai ancaman langsung terhadap integritas teritorial dan pengaruh regional Jepang. Jepang sedang melakukan penataan ulang strategis, seperti menafsirkan kembali konstitusi pasifiknya dan meningkatkan anggaran militernya sebagai tanggapan terhadap upaya modernisasi militer Tiongkok (Smith, 2020). Ketakutan ini telah mendorong Jepang untuk memperkuat aliansinya dengan Amerika Serikat dan memperkuat posisi pertahanan mereka. Selain itu, jika dilihat secara historis mengenai peran Tiongkok selama Perang Tiongkok-Jepang Kedua dalam kacamata Jepang, telah membentuk pandangan yang kuat terhadap Tiongkok sebagai ancaman keamanan potensial. Terlepas dari saling ketergantungan ekonomi di antara

kedua negara, Jepang tetap berhati-hati, terutama terkait niat Tiongkok dalam masalah keamanan regional (Smith, 2020).

Tiongkok memandang bahwa pembangunan militer dan agresi regionalnya merupakan langkah penting untuk menegaskan kedaulatannya dan merebut kembali apa yang dianggapnya sebagai wilayah yang hilang. Kekuatan militer Tiongkok yang terus meningkat telah memungkinkannya untuk mengejar tujuan keamanan yang lebih ambisius, yang sering kali bertentangan dengan kepentingan Jepang. Modernisasi militer Tiongkok, terutama pada kemampuan rudal dan angkatan laut telah membuat Jepang merasa semakin rentan terhadap tekanan militer Tiongkok. Jepang khawatir bahwa meningkatnya pengaruh Tiongkok atas proyek-proyek infrastruktur regional dapat menggeser keseimbangan kekuatan yang menguntungkan Tiongkok serta berpotensi melemahkan posisi Jepang di Asia Timur (Tao, 2022). Meningkatnya pengaruh regional Tiongkok semakin mempersulit perhitungan keamanan Jepang sehingga memaksanya untuk mengevaluasi kembali strategi diplomatik dan pertahanannya. Pada sisi lain, Jepang mengkhawatirkan strategi anti-akses/penolakan wilayah yang diterapkan oleh Tiongkok sebagai upaya mencegah intervensi militer asing pada kawasan tersebut (Tao, 2022). Strategi *Anti-Access/Area Denial* (A2/AD) yang diterapkan oleh Tiongkok telah menjadi tantangan utama bagi Jepang dan sekutunya, terutama Amerika Serikat, dalam menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. A2/AD bertujuan untuk membatasi atau mencegah akses militer asing ke wilayah tertentu dengan menggunakan kombinasi sistem pertahanan rudal, angkatan laut, dan teknologi perang elektronik (Koda, 2016). Salah satu elemen utama dalam strategi ini adalah penggunaan rudal balistik anti-kapal, seperti DF-21D (*carrier killer*) yang memiliki jangkauan lebih dari 1.500 km dan dirancang untuk menghancurkan kapal induk Amerika Serikat, serta DF-26 (*Guam Express*) dengan jangkauan hingga 4.000 km, yang memungkinkan Tiongkok menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di Guam (Pentagon, 2023). Tiongkok telah mengembangkan dan menerapkan strategi ini untuk mempertahankan klaim teritorialnya di Laut China Timur dan Laut China Selatan serta untuk menghalangi intervensi militer asing di

kawasan tersebut. Strategi A2/AD Tiongkok telah mengubah dinamika keamanan di Asia Timur, memaksa Jepang untuk meningkatkan belanja pertahanan dan memperkuat aliansi militernya dengan Amerika Serikat serta mitra regional lainnya. Tiongkok terus menekan kebebasan navigasi dan keamanan maritim Jepang dengan kemampuan rudal balistik yang semakin canggih, ekspansi pangkalan militer di Laut China Selatan, serta peningkatan aktivitas angkatan laut dan siber (Si Fu Ou, 2014).

Jepang merespons dengan meningkatkan kapasitas pertahanannya, memperluas aliansi strategis, dan mengembangkan teknologi militer baru untuk menghadapi tantangan A2/AD. Efektivitas respons Jepang dalam menghadapi dinamika keamanan regional akan sangat bergantung pada kesiapan teknologi pertahanannya, peningkatan kapasitas militer, serta koordinasi erat dengan sekutu strategisnya. Jepang tidak hanya harus mempercepat modernisasi sistem pertahanan dan persenjataannya, tetapi juga meningkatkan integrasi operasional dengan aliansi pertahanannya, terutama dengan Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara Quad (India, AS, Australia, dan Jepang). Tantangan terbesar bagi Jepang adalah bagaimana menyeimbangkan kebijakan pertahanannya dengan konstitusi pasifis yang masih berlaku, sementara secara bersamaan harus meningkatkan kapasitas pertahanan untuk menghadapi realitas ancaman yang berkembang. Oleh karena itu, keberhasilan Jepang dalam menghadapi strategi militer China di Indo-Pasifik tidak hanya akan ditentukan oleh kemajuan teknologinya, tetapi juga oleh sejauh mana Jepang dapat memperkuat koordinasi dengan sekutu dan membangun arsitektur keamanan kolektif yang solid untuk menjaga stabilitas kawasan.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis menyoroti isu dinamika keamanan yang berdampak pada situasi yang saling mengancam antara negara Tiongkok dan Jepang, maka dari itu, pertanyaan penelitian merujuk pada:

1.2.1 Bagaimana kebangkitan Tiongkok dapat mengubah status quo melalui implementasi strategi *gray zone tactics* dan *Anti-Access/Area Denial* (A2/AD) dalam keseimbangan kekuatan di kawasan Asia Timur terkhususnya pada hubungan Jepang - Tiongkok?

1.2.2 Bagaimana posisi Jepang dalam merespon ancaman pergeseran kekuasaan akibat dari kebangkitan Tiongkok melalui strategi *collective self defense*, *integrated deterrence* dan revitalisasi industri pertahanan?

1.2.3 Bagaimana hubungan antara Jepang - Tiongkok dalam konteks *balance of threat* dan resiko eskalasi konflik di Asia Timur?

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini memiliki fokus yang mencakup pada perubahan distribusi kekuatan di kawasan Asia Timur dalam aspek keamanan kawasan, dengan mengkaji kondisi Jepang dalam menyusun strategi untuk menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh kebangkitan Tiongkok. Pemilihan periode penelitian ini didasari oleh beberapa faktor dan peristiwa penting yang menunjukkan adanya peningkatan ketegangan geopolitik di Asia Timur serta perubahan kebijakan luar negeri Jepang dalam menghadapi Tiongkok pada tahun 2019 hingga 2023. Secara keseluruhan, kebijakan dan pernyataan resmi Jepang antara tahun 2019 hingga 2023 mencerminkan respons proaktif terhadap kebangkitan Tiongkok, dengan penekanan pada peningkatan kapabilitas pertahanan, penyesuaian strategi keamanan, dan diplomasi yang lebih aktif untuk menjaga keseimbangan kekuatan di Asia Timur, seperti pada tahun 2022, kebijakan luar negeri Jepang mengalami pergeseran signifikan dengan revisi *National Security Strategy* (NSS) yang menekankan peningkatan kapabilitas militer Jepang dalam menghadapi ancaman dari Tiongkok dan Korea Utara. Jepang juga semakin memperkuat kemitraan strategis dengan Amerika Serikat dan negara-negara Indo-Pasifik lainnya untuk menghadapi tantangan dari kebangkitan Tiongkok.

Fokus penelitian ini dibatasi pada pandangan Jepang sebagai salah satu negara yang terdampak oleh ancaman kebangkitan Tiongkok di kawasan Asia Timur terutama

dalam aspek keamanan. Sebagai kekuatan besar di Asia Timur yang memiliki hubungan kompleks dengan Tiongkok, Jepang berada dalam posisi strategis yang menarik untuk dianalisis, terutama dalam bagaimana negara ini menavigasi dilema keamanan dan pergeseran keseimbangan kekuatan di kawasan. Dengan kata lain, Jepang bukan hanya sekadar pengamat tetapi juga aktor utama yang kebijakannya dapat mempengaruhi dinamika keamanan regional. Melalui ruang lingkup dan pembatasan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana Jepang menyeimbangkan ancaman dari Tiongkok tanpa sepenuhnya mengkonfrontasi negara tersebut.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kebangkitan Tiongkok dapat mengubah status quo di kawasan Asia Timur melalui penerapan strategi *Gray Zone Tactics* dan *Anti Access/ Area Denial (A2/AD)* serta implikasinya terhadap keseimbangan kekuatan dalam kawasan terutama dengan hubungan hegemoni Tiongkok dalam konteks keamanan di Asia Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana Jepang merespons ancaman dari pergeseran kekuatan akibat dari kebangkitan Tiongkok di kawasan dengan menerapkan strategi *collective self defense*, *integrated deterrence* dan revitalisasi industri pertahanan serta mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dalam menjaga stabilitas keamanan nasional Jepang di kawasan Asia Timur.
3. Untuk mengetahui bagaimana dinamika hubungan Jepang dan Tiongkok dalam konteks *balance of threat* serta mengeksplorasi potensi eskalasi konflik dan resiko ketidakstabilan keamanan di kawasan Asia Timur sebagai akibat dari rivalitas strategis kedua negara.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis: penelitian ini memberikan penambahan wawasan akademik dalam studi Hubungan Internasional, khususnya dalam kajian keseimbangan

ancaman (*balance of threat*) dan pergeseran kekuasaan di kawasan Asia Timur. Memberikan kontribusi pada literatur mengenai kebangkitan Tiongkok dan dampaknya terhadap status quo regional, dengan fokus pada hubungan Jepang-Tiongkok dalam perspektif keamanan.

2. Kegunaan Praktis Ilmiah: penelitian ini memberikan pemahaman terkait penyesuaian kebijakan luar negeri Jepang dan pertahanannya dalam menghadapi tantangan dari Tiongkok yang dapat menjadi referensi bagi peneliti, akademisi, dan praktisi yang tertarik pada isu-isu keamanan internasional.

1.5 Kerangka Teoritis - Konseptual

Penelitian ini melihat strategi kekuatan besar di kawasan Asia Timur dari sudut pandang negara Jepang dan bagaimana perubahan distribusi kekuatan di kawasan akibat dari kebangkitan Tiongkok dapat mempengaruhi respon Jepang baik secara internal maupun eksternal dalam menyusun strategi untuk menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh Tiongkok melalui satu pendekatan teoritis utama yaitu *Balance of Threat* (Walt, 1985) untuk memahami pola interaksi kedua negara. Melalui pendekatan teori tersebut, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana Jepang mengidentifikasi ancaman, bagaimana tindakan Jepang dan Tiongkok menciptakan ketegangan yang berkelanjutan, dan bagaimana Jepang menyeimbangkan kepentingan keamanan dan ekonominya dengan Tiongkok, maka dari itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perubahan dinamika keamanan di kawasan Asia Timur serta strategi Jepang dalam menghadapi tantangan geopolitik yang semakin kompleks.

1.5.1 Balance of Threat

Kehadiran teori *Balance of Threat* dikembangkan oleh Stephen M. Walt pada tahun 1985 sebagai kritik terhadap teori *Balance of Power* yang memiliki argumen mengenai pencegahan dominasi hegemon suatu negara maka negara-negara lain akan secara otomatis menyeimbangkan kekuatannya dengan negara besar. Disisi lain, Walt

berpendapat bahwa negara lebih memperhatikan ancaman dibandingkan hanya dengan kekuatan. Keseimbangan ancaman muncul ketika menghadapi fakta bahwa aktor negara tidak selalu memiliki kekuatan terbesar, namun dapat menjadi aktor yang dianggap paling berbahaya. Salah satu peristiwa nyata yang dapat menjadi bukti dari penerapan teori ini adalah pada saat peristiwa Perang Dingin, dimana banyak negara-negara dengan kekuatan besar tidak segera menyeimbangkan kekuatan negara Amerika Serikat, namun negara seperti Uni Soviet hadir sebagai penyeimbang kekuatan dominan Amerika Serikat karena dianggap mengancam (Walt, 1985).

Walt (1985) mengidentifikasikan empat indikator utama yang menentukan sebuah negara dapat dianggap sebagai ancaman melalui *aggregate power*, *geographic proximity*, *offensive capability* dan *offensive intentions*. *Aggregate power* mengidentifikasi kekuatan total dari kemampuan industri sebuah negara, populasi, kemampuan militer dan jumlah sumber daya negara yang berpotensi sebagai ancaman besar. *Geographic proximity* mengidentifikasi permasalahan batas-batas serta kedekatan antar negara secara geografis dimana negara yang berbatasan dengan jarak yang lebih dekat akan dianggap lebih mengancam dibandingkan negara dengan perbatasan yang jauh. *Offensive capability* mengidentifikasi kemampuan militer sebuah negara termasuk dengan kemampuan penyerangan dan peralatan alutsista yang unggul dapat memperkuat ancaman negara satu kepada negara lain. Sedangkan *offensive intentions* melihat bagaimana sebuah negara memiliki niat mengancam melalui tindakan yang agresif dan ekspansionis. Dalam konteks ini, Jepang tidak hanya melihat kebangkitan Tiongkok sebagai peningkatan kekuatan ekonomi dan militer, tetapi juga sebagai ancaman yang semakin nyata terhadap stabilitas kawasan, khususnya dalam konflik Laut China Timur dan isu keamanan maritim.

Menurut teori *balance of threat*, suatu negara akan menyeimbangkan ancaman eksternal melalui keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal, dimana pada keseimbangan internal, sebuah negara akan meningkatkan kemampuan militernya untuk menghadapi ancaman nyata dari kekuatan eksternal serta diimbangi oleh keseimbangan eksternal yang berarti bahwa suatu negara berarti akan membentuk

aliansi strategis dengan negara lain untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh ancaman tersebut (Walt, 1987). Ancaman dari perilaku Tiongkok di kawasan bukan hanya sekedar peningkatan kekuatan regional namun berakibat mengancam pada perubahan status quo yang mempengaruhi geopolitik regional. Faktor-faktor yang berpengaruh seperti peningkatan kapabilitas militer Tiongkok dan anggaran militer yang terus meningkat memaksa Jepang untuk melakukan keseimbangan ancaman secara penuh terhadap Tiongkok melalui peningkatan kapabilitas militer, perubahan kebijakan luar negeri serta pembentukan aliansi Quad bersama Amerika Serikat, India dan Australia. Penelitian ini menggunakan teori *Balance of Threat* untuk menjelaskan bagaimana kebangkitan Tiongkok menimbulkan ancaman bagi Jepang dan bagaimana Jepang menanggapi dengan menggunakan strategi *balancing*. Perubahan kebijakan pertahanan Jepang dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan bahwa Jepang secara aktif mengubah strategi keamanannya untuk mengatasi ancaman dari Tiongkok.

1.6 Asumsi Penelitian

Penelitian ini berasumsi bahwa kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan dominan di kawasan dianggap sebagai sebuah ancaman nyata bagi negara Jepang dikarenakan adanya peningkatan modernisasi militer Tiongkok yang berkembang secara signifikan, sentimen historis yang belum terselesaikan, serta kebijakan luar negeri Tiongkok yang semakin tegas dalam sengketa teritorial. Hal tersebut telah mendorong Jepang untuk menyesuaikan kebijakan pertahanannya, terutama dalam aspek peningkatan kapabilitas militer dan penguatan alutsista. Periode tahun 2019 hingga 2023 merupakan fase kritis dalam perubahan strategi pertahanan Jepang, yang dipicu oleh meningkatnya agresivitas militer Tiongkok. Pada tahun 2019, Jepang mulai menyesuaikan postur pertahanannya dengan meningkatkan kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat. Pada tahun 2020, Jepang mulai mempercepat pengembangan teknologi militer setelah melihat meningkatnya ketegangan di Laut China Timur dan Taiwan. Tahun 2021 menandai eskalasi lebih lanjut dengan diterapkannya Undang-Undang *Coast Guard Law*, yang memberikan wewenang kepada penjaga pantai Tiongkok untuk menggunakan kekuatan terhadap kapal asing di perairan yang

diklaimnya. Jepang menanggapi kebijakan ini dengan meningkatkan patroli maritimnya dan memperkuat sistem radar serta pengawasan di sekitar Kepulauan Okinawa. Pada tahun 2022, Jepang secara resmi mengadopsi doktrin pertahanan baru yang memungkinkan penggunaan kekuatan militer secara lebih aktif dalam menghadapi ancaman. Respons militer Jepang terhadap kebangkitan Tiongkok akan berdampak langsung terhadap stabilitas kawasan Asia Timur. Dengan semakin kuatnya kemampuan pertahanan Jepang, kawasan Asia Timur dapat mengalami dua skenario utama: pertama, peningkatan kapabilitas Jepang dapat berfungsi sebagai *deterrence* (pencegah konflik), yang mengurangi kemungkinan serangan dari Tiongkok; atau kedua, respons Jepang dapat memicu reaksi keras dari Tiongkok, yang meningkatkan risiko eskalasi konflik di Laut China Timur dan sekitarnya. Jepang juga menghadapi dilema dalam meningkatkan kekuatannya, karena setiap langkah yang diambil untuk memperkuat pertahanan dapat dipersepsikan oleh Tiongkok sebagai tindakan provokatif, yang dapat memperburuk hubungan bilateral dan meningkatkan ketegangan di kawasan.

Ketegangan ini menciptakan situasi yang rentan terhadap eskalasi apabila tidak dikelola dengan mekanisme diplomasi dan komunikasi keamanan yang efektif. Tanpa adanya upaya untuk membangun kepercayaan dan mengurangi mispersepsi, kompetisi strategis antara kedua negara dapat berujung pada peningkatan konflik di berbagai bidang, baik maritim, ekonomi, maupun militer. Seiring dengan terus berkembangnya lanskap geopolitik, arah serta stabilitas arsitektur keamanan di Asia Timur akan sangat bergantung pada bagaimana Jepang dan Tiongkok menavigasi hubungan mereka, termasuk dalam merespons perubahan keseimbangan kekuatan dan dinamika ancaman yang ada. Jika Jepang dan Tiongkok gagal mengelola dilema keamanan ini, Asia Timur dapat memasuki periode ketidakstabilan yang berkepanjangan, dengan konsekuensi besar bagi perdamaian global. Dengan asumsi-asumsi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pertahanan Jepang berkembang dalam menghadapi kebangkitan militer Tiongkok, serta bagaimana modernisasi alutsista Jepang berperan dalam menjaga keseimbangan kekuatan di Asia Timur.

1.7 Kerangka Analisis

